

**PENGARUH TINGKAT EFEKTIVITAS DAN
KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL
DAN RESTORAN TERHADAP PENERIMAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KOTA BATAM**

SKRIPSI



**Oleh
Dicho Arisza
130810128**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2017**

**PENGARUH TINGKAT EFEKTIVITAS DAN
KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL
DAN RESTORAN TERHADAP PENERIMAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh
Dicho Arisza
130810128**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2017**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 13 Februari 2017

Yang membuat pernyataan,

Dicho Arisza

130810128

**PENGARUH TINGKAT EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI
PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) KOTA BATAM**

**Oleh
Dicho Arisza
130810128**

**SKRIPSI
Untuk memenuhi salah satu syarat
Guna memperoleh gelar sarjana**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini**

Batam, 13 Februari 2017

**Erni Yanti Natalia, S.Pd., M.Pd.K., M.Ak.
Pembimbing**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh tingkat efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Batam. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu menganalisis data realisasi pajak hotel dan restoran tahun 2011-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dari pajak hotel dan restoran dari tahun 2011-2015 sangat bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi pajak hotel terjadi pada tahun 2014 sebesar 115,59% dan terendah pada tahun 2015 sebesar 98,26%. Pada pajak restoran tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 117,57% dan terendah pada tahun 2015 yaitu sebesar 101,20%. Untuk kontribusi pajak hotel dan restoran dari tahun 2011-2015 juga sangat bervariasi. Persentase kontribusi pajak restoran tertinggi pada tahun 2011 sebesar 12,51% terendah tahun 2014 sebesar 9,51%. Kontribusi pajak restoran tertinggi tahun 2011 sebesar 6,00% dan terendah tahun 2014 sebesar 4,90%. Secara keseluruhan jumlah PAD tidak hanya dipengaruhi oleh pajak hotel dan restoran saja, tetapi masih terdapat jenis penerimaan lainnya yang dapat mempengaruhi jumlah PAD secara keseluruhan.

Kata Kunci: efektivitas, kontribusi, pajak hotel, pajak restoran, PAD.

ABSTRACT

The purpose of this study to determine the effect of the level of effectiveness and contribution of hotel and restaurant taxes to PAD Batam. This research was conducted at the Regional Revenue Office Batam. The method used in this research is descriptive method of analyzing the data of hotel and restaurant tax years 2011-2015. The results showed that the level of effectiveness of hotel and restaurant taxes varies greatly from year 2011-2015. The highest level of effectiveness of hotel tax occurred in 2014 amounted to 115.59% and the lowest in 2015 amounted to 98.26%. At the restaurant tax effectiveness rate was highest in 2014 amounted to 117.57% and the lowest was in 2015 that is equal to 101.20%. For hotel and restaurant tax contributions from the years 2011-2015 are also very varied. The percentage contribution of the highest restaurant tax in 2011 amounted to 12.51% the lowest in 2014 amounted 9.51%. The highest restaurant tax contribution in 2011 amounted to 6.00% and the lowest in 2014 amounted to 4.90%. Overall the number of PAD is not only influenced by the hotel and restaurant tax, but there are other types of receipts that can affect the amount of revenue overall.

Keyword: *Effectiveness, Contribution, Hotel Tax, Restaurants tax, Local Revenue.*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu K.a DR Nur Husda, S.kom., M.Si, selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Haposan Banjarnahor, S.E., M.SI. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam yang juga mendampingi dan mendukung kami.
3. Ibu Erni Yanti Natalia, S.pd., M.Pd.K., M.Ak. selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.
4. Seluruh Dosen Program Studi Akuntansi dan Staff Bagian Akademik (BAAK) Universitas Putera Batam yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis sejak awal hingga akhir perkuliahan.
5. Terima kasih kepada kedua orang tua penulis, yang banyak membantu serta selalu memberikan doa dan dukungan yang tak pernah putus hingga membuat penulis dapat menyelesaikan pendidikan strata 1 (S1) Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.
6. Terima kasih kepada semua karyawan atau staff Universitas Putera Batam yang telah membantu melakukan berbagai administrasi.

7. Terima kasih kepada semua teman, sahabat yang telah mensupport agar skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati, Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-Nya kepada kita, Aamiin.

Semoga Allah membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah Nya, Amin

Batam, 13 Februari 2017

Dicho Arisza

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERNYATAAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR RUMUS	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2.Identifikasi Masalah.....	8
1.3.Pembatasan Masalah.....	8
1.4. Rumusan Masalah.....	9
1.5.Tujuan Penelitian.....	9
1.6.Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Teori Dasar.....	12
2.1.1. Pendapatan Asli Daerah.....	12
2.1.2 Pengertian Pajak.....	14
2.1.3. Fungsi Pajak.....	16
2.1.4. Pengelompokkan Pajak.....	17
2.1.5. Syarat Pemungutan Pajak.....	20
2.1.6. Pajak Hotel Dan Pajak Restoran.....	22
2.1.6.1 Pajak Hotel.....	22
2.1.6.2. Pajak Restoran.....	23
2.1.7 Efektivitas Dan Kontribusi.....	26
2.1.7.1. Efektivitas.....	26
2.1.7.2 Kontribusi.....	27
2.2. Penelitian Terdahulu.....	29
2.3. Kerangka Pemikiran.....	33
2.4. Hipotesis.....	34

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1.	Desain Penelitian	35
3.2.	Operasional Variabel	40
3.2.1.	Variabel Independen	41
3.2.2.	Variabel Dependen.....	43
3.3.	Populasi Dan Sampel	44
3.3.1.	Populasi.....	44
3.3.2.	Sampel.....	45
3.4.	Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.5.	Metode Analisis Data.....	47
3.5.1.	Analisis Deskriptif	47
3.5.2.	Uji Asumsi Klasik.....	48
3.5.2.1.	Uji Normalitas.....	48
3.5.2.2.	Uji Multikolinearitas	49
3.5.2.3.	Uji Heteroskadasitas	50
3.5.2.4.	Uji Autokorelasi.....	50
3.5.3.	Uji Pengaruh	52
3.5.3.1.	Regresi Linear Berganda.....	52
3.5.4.	Uji Hipotesis	53
3.5.4.1.	Uji Parsial (T-Test)	54
3.5.4.2.	Uji Simultan (F-Test).....	55
3.5.4.3.	Uji Koefisien Determinasi	56
3.6.	Lokasi Dan Jadwal Penelitian	57
3.6.1.	Lokasi Penelitian.....	57
3.6.2.	Jadwal Penelitian	57

BAB IV PEMBAHASAN

4.1.	Hasil Penelitian	59
4.1.1.	Hasil Tingkat Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran	59
4.1.1.1.	Perhitungan Efektivitas Pajak Hotel	59
4.1.1.2.	Perhitungan Efektivitas Pajak Restoran.....	60
4.1.1.3.	Perhitungan Kontribusi Pajak Hotel	60
4.1.1.4.	Perhitungan Kontribusi Pajak Restoran	61
4.2.	Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	62
4.2.1	Hasil Uji Asumsi Klasik	63
4.2.1.1	Hasil Uji Normalitas	64

	Halaman
4.2.1.2 Uji Multikolinearitas	67
4.2.1.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	68
4.2.1.4 Hasil Uji Autokorelasi	70
4.3. Hasil Uji Pengaruh	71
4.3.1 Metode Regresi Linear Berganda	71
4.4. Hasil Uji Hipotesis	73
4.4.1. Hasil Uji T	73
4.4.2. Hasil Uji F	75
4.4.3. Hasil Uji Koefisien Determinasi	76
4.5. Pembahasan	76
4.5.1. Pengaruh Tingkat Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD	76
4.5.2. Pengaruh Tingkat Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD	77
4.5.3. Pengaruh Tingkat Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Secara Bersama-Sama Terhadap PAD	78
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	80
5.2. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
SURAT KETERANGAN PENELITIAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	31
Tabel 3.1. Jadwal Penelitian	58
Tabel 4.1. Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel	59
Tabel 4.2. Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran	60
Tabel 4.3. Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel.....	61
Tabel 4.4. Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran	61
Tabel 4.5. Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	62
Tabel 4.6. Hasil Uji Kolmogrov-Smirnov	66
Tabel 4.7. Hasil Uji Multikolinearitas	67
Tabel 4.8. Hasil Uji Heteroskedastisitas	70
Tabel 4.9. Hasil Uji Autokorelasi	71
Tabel 4.10. Hasil Uji Linear Berganda	72
Tabel 4.11. Hasil Uji T	74
Tabel 4.12. Hasil Uji F.....	75
Tabel 4.13. Hasil Uji R	76

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran.....	33
Gambar 3.1. Desain Penelitian.....	38
Gambar 4.1. Histogram Normalitas P-Plot.....	64
Gambar 4.2. Histogram Normalitas	65
Gambar 4.4. Hasil Uji Heteroskedastisitas	69

DAFTAR RUMUS

	Halaman
Rumus 2.1. Analisis Efektivitas	27
Rumus 2.2. Analisis Kontribusi	29
Rumus 3.1. Autokorelasi.....	51
Rumus 3.2. Regresi Linear Berganda	53
Rumus 3.3. F-Test	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	Surat Ijin Penelitian
Lampiran III	Data Sekunder Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan PAD
Lampiran IV	Hasil Olahan Statistik Deskriptif
Lampiran V	Hasil Olahan Asumsi Klasik
Lampiran VI	Hasil Olahan Uji Pengaruh
Lampiran VII	Tabel Uji T
Lampiran VIII	Tabel Uji F

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan sebuah negara besar di kawasan Asia bahkan Dunia, Indonesia terdiri dari jajaran pulau yang terbentang luas dari Sabang sampai dengan Marauke, yang mana didalam pulau tersebut terdapat beberapa Provinsi, untuk saat ini sudah terdapat 34 Provinsi yang terdapat di Indonesia. Yang mana di dalam Provinsi tersebut terdapatlah suatu daerah berupa kabupataen/kota yang termasuk bagian dari Provinsi tersebut, salah satunya ialah Kota Batam. Kota Batam sendiri merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau, yang terdapat di pulau Sumatra. letak Kota Batam bisa dikatakan cukup strategis, karena Kota Batam langsung berdekatan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Yang mana diharapkan dari letak strategis tersebut Kota Batam dapat terus menggali semua potensi yang ada, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Batam ataupun kepri maupun pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam Era modern saat ini lewat otonomi daerah menghendaki setiap daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan daerah, ini dimaksudkan agar daerah tersebut dapat membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Daerah otonom mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat

berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pembangunan nasional diawali dengan pembangunan pondasi ekonomi sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi, untuk itu pemerintah harus berusaha meningkatkan pendapatan daerah guna menunjang keberhasilan pembangunan.

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Diantara sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah, hasil pajak daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang potensial dan memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut. Pajak hotel dan restoran merupakan salah satu dari pajak daerah yang harus dikelola dan dimanfaatkan secara baik oleh daerah tersebut guna meningkatkan penerimaan pendapatan daerah tersebut. Diharapkan dari pajak hotel dan restoran tersebut dapat memberikan kontribusi yang cukup maksimal dalam pembangunan ekonomi daerah tersebut dan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Menurut UU no 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 pajak Kabupaten/Kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air dan tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pajak daerah itu sendiri ditetapkan oleh daerah itu sendiri berdasarkan peraturan daerah tersebut guna untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah tersebut. Ini bertujuan agar setiap objek pajak yang terlibat dalam pajak daerah tersebut dapat mematuhi dan menyesuaikan dengan peraturan daerah tentang ketetapan pajak daerah tersebut, dan bilamana terdapat kecurangan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan maka akan diberikan teguran maupun sanksi atas kecurangan yang dilakukan yang berpedoman kepada peraturan daerah tersebut. Untuk Kota Batam sendiri peraturan tentang pajak daerah diatur oleh Dispenda Kota Batam, yang mana salah satu dari peraturan ini tertuang dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 23 tahun 2011, tentang petunjuk pelaksanaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, dan pajak parkir kota Batam..

Hotel dan Restoran merupakan sektor potensial bagi peningkatan ataupun pertumbuhan di daerah. Oleh sebab itu diharapkan penerimaan yang efektif dari pajak

hotel dan restoran ini, dan juga diharapkan adanya kontribusi yang cukup bagus dari penerimaan pajak hotel dan restoran ini. Menurut buku Undang-Undang Pajak Lengkap (2014 : 352), Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Subjek dari pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel sedangkan Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (pasal 4 ayat 1 dan 2, Peraturan Walikota Batam Nomor 23 Tahun 2011).

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan/minuman dengan di pungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering (Undang-Undang Pajak Lengkap, 2014 : 352). Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, pusat jajanan serba ada (pujasera/food court), bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering meliputi penjualan makanan dan minuman (Pasal 8 Ayat 1, Peraturan Walikota Batam Nomor 23 Tahun 2011). Subjek

pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan/minuman dari restoran tersebut, sedangkan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran yang mencakup rumah makan, kafetria, kantin, warung, pusat jajanan serba ada (pujasera/food court), bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering yang nilai penjualannya mencapai 10 juta per bulan (Pasal 9 Ayat 1 dan 2, Peraturan Walikota Batam Nomor 23 Tahun 2011).

Kota Batam saat ini berdasarkan rekapitulasi wajib pajak daerah kota Batam tahun 2011-2015 dari sektor pajak hotel, tercatat ada 199 hotel yang tercatat sebagai wajib pajak daerah Kota Batam. Yang terdiri dari hotel berbintang dan non berbintang. Hotel berbintang berjumlah 63, sedangkan hotel non berbintang berjumlah 133. Sedangkan, untuk restoran berdasarkan rekapitulasi wajib pajak daerah kota Batam dari tahun 2011-2015 dari sektor pajak restoran tercatat ada sekitar 645 restoran. Yang mana masing masing terdiri dari 376 restoran, 132 rumah makan, dan 137 warung kopi, (sumber, dispenda.batamkota.go.id).

Penerimaan pajak hotel dan restoran secara keseluruhan dari tahun 2011-2015 sangat bervariasi. Untuk hotel secara keseluruhan penerimaan pajaknya dari tahun 2011-2015 sangat bervariasi. Diantaranya tahun 2011-2014 penerimaannya bisa dikatakan sangat efektif karena selalu mencapai target yang ditetapkan. Namun pada tahun 2015 penerimaan dari sektor pajak hotel tidak mencapai target yang ditetapkan, dimana penerimaannya hanya mencapai 80.450.882.150,07 sedangkan target yang ditetapkan pada tahun 2015 sebesar 81.874.916.309,94 Hotel sendiri penerimaannya

ada dua kategori yaitu hotel berbintang dan hotel non berbintang. Untuk hotel berbintang penerimaannya dari tahun 2011-2014 selalu mencapai target. Yang mana persentase tertinggi terjadi pada tahun 2014 dengan 116,55%, dengan penerimaan Rp 70.102.956.907,87. Sedangkan persentase terendah terjadi pada tahun 2015 dengan persentase 98,46% dari target yang ditetapkan. Adanya penerimaan pajak hotel yang tidak mencapai target ini dikarenakan kurangnya kesadaran dari wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya, karena keterlambatan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya dan juga karena kecilnya pendapatan yang diterima hotel dari sektor pajak hotel tersebut sehingga mengakibatkan penerimaan pajaknya pun kecil. Untuk itu pemerintah harus mengupayakan lagi agar penerimaan pajak hotel itu terus meningkat setiap tahunnya untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah itu sendiri.

Sedangkan, untuk restoran secara keseluruhan penerimaannya dari tahun 2011-2015 sangat efektif karena selalu mencapai target bahkan melebihinya. Persentase tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu 117,57%. Namun bila dilihat secara rinci berdasarkan sumber penerimaan pajak restoran ada tiga yakni pajak restoran, pajak rumah makan, pajak warung kopi. Pada tahun 2014 penerimaan dari pajak warung kopi tidak mencapai target yakni hanya Rp. 1.054.408.611,00 dari target yang ditetapkan yaitu Rp. 1.525.000,00. Bila dipersentasekan hanya mencapai 69,14% dari target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa masih terdapat beberapa sektor baik dari pajak hotel maupun pajak restoran dari tahun 2011-2015 yang belum efektif penerimaannya. Oleh sebab itu perlu perhatian yang serius dari Dinas Pendapatan Kota Batam dalam melihat fenomena tersebut dan perlu segera dicari sumber permasalahannya agar tidak terjadi lagi hal semacam ini di tahun-tahun berikutnya agar efektif penerimaannya sehingga memberikan kontribusi yang maksimal terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam. Untuk penerimaan yang telah mencapai atau melebihi target yang telah ditetapkan haruslah bisa dipertahankan maupun di tingkatkan lagi penerimaannya. Semakin tinggi penerimaan tersebut maka akan semakin bagus pula kontribusinya guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.

Guna mengoptimalkan penerimaan Pendapatan asli daerah lewat pajak daerah khususnya pajak hotel dan restoran, tentunya perlu dilakukan perhitungan penerimaan pajak hotel dan restoran pada Dinas Pendapatan Asli Daerah (DISPENDA) Kota Batam secara cermat dan akurat yang berguna terhadap peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah itu sendiri khususnya dari pajak hotel dan restoran pada DISPENDA Kota Batam.

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas. Maka peneliti sangat tertarik untuk membahas permasalahan yang ada kedalam tugas akhir dengan judul **“Pengaruh tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam”**.

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, adapun masalah-masalah yang dapat diidentifikasi sehubungan dengan penelitian yang dilakukan antara lain:

1. Adanya penerimaan pajak hotel (hotel berbintang dan non berbintang) dan restoran yang tidak mencapai target yang ditetapkan akan mengakibatkan kurang efektifnya penerimaan pajak tersebut bagi Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.
2. Penerimaan pajak hotel dan restoran yang rendah atau tidak mencapai target mengakibatkan kontribusi yang diberikannya rendah pula terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.
3. Penerimaan pendapatan daerah dari sektor pajak hotel dan restoran di Kota Batam yang telah mencapai target setiap tahun perlu diperhatikan keefektifan penerimaannya dan harus terus ditingkatkan, sehingga dapat memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini agar lebih terarah pada permasalahan yang dihadapi sesuai dengan tujuan penelitian, maka perlu ditetapkan batasan masalah terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun batasan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini membatasi sejauh mana tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dari tahun 2011-2015 terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.
2. Penelitian ini membatasi sejauh mana tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak restoran dari tahun 2011-2015 terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.
3. Penelitian ini membatasi mengenai sejauh mana tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran dari tahun 2011-2015 terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.

1.4 Rumusan masalah

1. Apakah tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam?
2. Apakah tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam?
3. Apakah tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam?

1.5 Tujuan penelitian

Dalam penelitian hendaklah mempunyai tujuan yang ingin dicapai, begitupun dengan penelitian ini adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.
3. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Aspek teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam. Dan penelitian ini disajikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.6.2 Aspek Praktis

1.6.2.1 Bagi Dispenda Kota Batam

Sebagai sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Daerah khususnya Dispenda Kota Batam, dan juga dapat memberikan informasi mengenai tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan Asli Daerah Kota Batam.

1.6.2.2 Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para akademis yang khususnya pada Fakultas Ekonomi dan juga dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.6.2.3 Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah pengetahuan serta wawasan penulis tentang pajak daerah khususnya pajak hotel dan pajak restoran dan juga tentang pendapatan asli daerah. Penelitian ini juga guna untuk menyelesaikan Tugas Akhir ataupun Skripsi di Universitas Putera Batam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo,2011:1). Dengan adanya pendapatan asli daerah dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah, guna mengetahui sejauh mana pendapatan daerah yang didapat dari sektor pajak khususnya pajak daerah tersebut. Bila pendapatan yang diterima dari sektor pajak ini tinggi maka diharapkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut berkembang dengan baik pula. Pendapatan asli daerah yang salah satunya adalah pajak daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangga nya sendiri.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah. Dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan keuangan

suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah (Nurcholis, 2012: 182).

Untuk Kota Batam sendiri Pendapatan Asli Daerah di kelola oleh Dinas Pendapatan Kota Batam. Dinas Pendapatan Kota Batam berawal dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau Cabang Kotamadya Administratif Batam, terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1983, peresmian Cabang Dinas Pendapatan Daerah pada tanggal 24 Desember 1983. Perubahan selanjutnya berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi Riau Tahun 1996, maka Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau Cabang Kotamadya Administratif Batam berubah menjadi Suku Dinas Pendapatan Kota Batam. Ini berubah pada bulan April Tahun 2000 sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Batam di bentuk sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 dan diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

2.1.2 Pengertian Pajak

Menurut Prof.Dr.A.Adriani Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum(undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Priantara, 2013: 2).

Menurut S.I Djajadiningrat yang dikutip oleh Siti resmi pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke Kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Priantara, 2013: 2).

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh Pemerintah dari masyarakat atau badan untuk menutupi pengeluaran rutin Negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung (Prasetyono, 2012: 11).Pembayaran pajak kepada negara yang dilakukan pada sistem perpajakan lama sebagian besar merupakan warisan kolonial, sehingga untuk masa sekarang dianggap kurang memperhatikan hak asasi rakyat. Dahulu, falsafah yang dianut adalah pajak dipungut hanya merupakan kewajiban semata-mata yang harus dilaksanakan rakyat secara patuh

untuk menghimpun dana bagi pemerintah penjajah. Pada masa sekarang , Falsafah Pemungutan Pajak adalah berdasarkan Undang-Undang 1945 yang berdasarkan pancasila, pemungutan pajak dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dimana sistem dan mekanismenya menjadi ciri tersendiri dalam Sistem Perpajakan di Indonesia.

Menurut Prof.Dr.H.Rochmat soemitro,SH Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik(kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut.Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Prasetyono, 2012: 12-13).

Dari definisi tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut (Mardiasmo, 2011: 1) :

1. Iuran dari rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, iuran tersebut hanyalah dapat berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa adanya timbal balik atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh Pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.3 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan. Karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas menurut (Priantara, 2013: 4) pajak mempunyai beberapa fungsi diantaranya sebagai berikut:

1. Fungsi Budgetair (Pendanaan)

Fungsi Budgetair disebut juga fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang mempunyai historis pertama kali timbul. Fungsi budgetair adalah fungsi yang letaknya di sektor publik dan pajak merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara,

sedangkan fungsi mengatur pajak digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan, upaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara dilakukan melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi. Kebijakan Ekstensifikasi berkaitan dengan penambahan wajib pajak terdaftar sedangkan kebijakan Identifikasi pajak berkaitan dengan upaya menggali potensi pajak yang belum atau kurang maksimal pengenaan pajaknya.

2. Fungsi Regulaiir (Mengatur)

Fungsi Regulaiir disebut juga fungsi tambahan yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Disebut sebagai fungsi tambahan karena hanya sebagai fungsi pelengkap dari fungsi utama pajak sebagai sumber pemasukan dan penerimaan dana bagi pemerintah. Untuk mencapai tujuan tertentu maka pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan untuk mencapai tujuan tersebut. Meskipun bukan merupakan fungsi utama, fungsi regulaiir pada Ekonomi Makro merupakan hal penting sebagai Instrument Kebijakan Fiskal dari Pemerintah yang menjadi Mitra Kebijakan Moneter yang dikeluarkan oleh Bank Sentral (BankIndonesia).

2.1.4 Pengelompokan pajak

Dalam berbagai Liberatur Ilmu Keuangan Negara dan Pengantar Ilmu Hukum Pajak terdapat perbedaan atau penggolongan pajak serta jenis-jenis pajak. Berikut ini

adalah penggolongan pajak yang dibedakan menurut golongan, sifat, dan menurut lembaga pemungutan (Priantara, 2013:6-7) :

A. Pajak Menurut Golongan

1. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya langsung kepada wajib pajak yang berkewajiban membayar pajaknya. Ini artinya wajib pajak yang bersangkutan yang harus memikul beban pajak dan beban pajak ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Contoh: Pajak Penghasilan (pph).

2. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada pihak lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPNbm).

B. Pajak Menurut Sifat

1. Pajak Subjektif

adalah Pajak yang waktu pengenaan nya yang pertama diperhatikan adalah subjek pajaknya. Setelah subjeknya diketahui barulah kemudian menentukan objeknya.

Contoh: Pajak Penghasilan (pph)

2. Pajak Objektif

adalah Pajak yang waktu pengenaannya yang diperhatikan pertama kali adalah objeknya, setelah objeknya diketahui barulah menentukan subjeknya.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (ppn) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

C. Pajak Menurut Lembaga Pemungutan

1. Pajak Pusat

adalah Pajak yang di Administrasikan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementrian Keuangan yakni Direktorat Jendral Pajak (DJP).

Contoh: Pajak Penghasilan (pph) dan Pajak Pertambahan Nilai (ppn).

2. Pajak Daerah

adalah pajak yang diadministrasikan oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah tersebut (Mardiasmo, 2011:6). Pajak ini terdiri dari:

- a. Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- b. Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan lain-lain.

2.1.5 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut (Prasetyono, 2012: 20-21), tidaklah mudah untuk membebaskan pajak kepada masyarakat, bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidaklah akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Harus Adil

Seperti halnya Produk Hukum, pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam pemungutan pajak. Baik dalam perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya. Misalnya, dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak, pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat menjadi wajib pajak, sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran dan lain sebagainya.

2. Pajak Harus Berdasarkan UU

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan undang-undang tentang pajak yaitu:

- a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara berdasarkan Undang-Undang tersebut harus dijamin kelancarannya.

- b. Jaminan Hukum bagi para wajib pajak oleh untuk tidak di perlakukan secara umum.
 - c. Jaminan akan terjaganya keberhasilan bagi para wajib pajak.
3. Pemungutan pajak tidak mengganggu Perekonomian
- Pemungutan Pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi Perekonomian, baik kegiatan Produksi, Perdagangan maupun Jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat dan menengah.
4. Pemungutan pajak harus Efisien
- Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu sistem pemungutan pajak harus sederhana mungkin dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam dari segi waktu.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
- Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibayarkan, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak, sebaliknya, jika pemungutan pajak yang rumit, orang akan semakin enggan dalam membayar pajak.

2.1.6 Pajak Hotel Dan Pajak Restoran

2.1.6.1 Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga Motel, Losmen, Gubuk Pariwisata, Wisma Pariwisata, Pesanggrahan, Rumah Penginapan dan sejenisnya, serta Rumah Kos dengan kamar lebih dari sepuluh (Priantara, 2013:541-542).

Berdasarkan pengertian tersebut, Objek Pajak dari jenis pajak ini adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran termasuk :

1. Fasilitas penginapan/fasilitas tinggal jangka pendek
2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Jasa penunjang adalah Fasilitas Telepon, Facsimile, Teleks, Internet, Fotocopy, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola pihak hotel.
3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel.
4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan dihotel.

Sedangkan yang tidak termasuk objek pajak hotel adalah:

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah
2. Jasa sewa Apartement, kondonium, dan sejenisnya

3. Jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan
4. Jasa tempat tinggal dirumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, panti sosial dan lain sebagainya
5. Jasa Biro pelayanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Dasar pengenaannya adalah jumlah pembayaran yang dilakukan atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Sedangkan tarif paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada pihak hotel. Wajib pajak hotel adalah pengusaha hotel. Pajak hotel yang terutang dipungut di daerah tempat hotel berlokasi.

Di era modern saat ini, perkembangan hotel bisa dikatakan sangat pesat yaitu dengan bertambahnya jumlah hotel yang ada di setiap daerah dari tahun ke tahun. Untuk Kota Batam sendiri saat ini berdasarkan rekapitulasi wajib pajak daerah kota Batam tahun 2011-2015 dari sektor pajak hotel, tercatat ada 199 hotel yang tercatat sebagai wajib pajak daerah Kota Batam. Yang terdiri dari hotel berbintang dan non berbintang. Hotel berbintang berjumlah 63, sedangkan hotel non berbintang berjumlah 133, (sumber: dispenda.batamkota.go.id).

2.1.6.2 Pajak Restoran

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kantin, warung, bar, dan sejenisnya,

termasuk jasa boga/catering. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan/minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat maupun ditempat lain. Tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Dengan demikian pajak atas jasa boga atau catering yang dahulu sering dipertanyakan apakah menjadi objek ppn atau objek daerah terjawab sudah yaitu sebagai objek pajak daerah dan bukan objek ppn (Priantara, 2013: 542).

Yang menjadi dasar pengenaan dari pajak ini adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Sedangkan tarifnya ditetapkan dengan peraturan daerah setempat paling tinggi sebesar 10%. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan/minuman dari restoran. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pengusaha restoran. Pajak restoran yang dipungut di wilayah daerah tempat restoran tersebut berlokasi.

Sedangkan menurut Siahaan(2009) yang dikutip dalam penelitian Memah (2013) menyatakan bahwa Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain. Termasuk dalam objek pajak restoran adalah Rumah Makan, Bar, Café dan lain sebagainya. Siahaan (2009) yang dikutip dalam penelitian Memah (2013) menyatakan pada pajak restoran yang menjadi subjek

pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan atau minuman dari restoran. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan atau minuman tersebut.

Menurut (Siahaan, 2009:329) yang dikutip dalam penelitian Memah (2013) menyatakan bahwa dasar hukum pemungutan pajak restoran adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
5. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 3-8 tentang Pajak Restoran.

Sedangkan menurut Siahaan(2009) yang dikutip dalam penelitian Memah (2013), menyatakan bahwa wajib pajak restoran wajib melaporkan kepada Bupati/Walikota, wajib pajak yang telah memiliki NPWP setiap awal masa pajak wajib mengisi SPTPD. SPTPD diisi dengan jelas lengkap dan benar serta

ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan selambat-lambatnya Lima Belas (15) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Bisnis restoran ini bisa dikatakan sebagai salah satu bisnis yang menjanjikan di masa sekarang ini. Ini terlihat dengan sangat banyak sekali jumlah restoran-restoran yang terdapat di setiap daerah. Untuk Kota Batam sendiri saat ini berdasarkan rekapitulasi wajib pajak daerah kota Batam dari tahun 2011-2015 dari sektor pajak restoran tercatat ada sekitar 645 restoran. Yang mana masing masing terdiri dari 376 restoran, 132 rumah makan, dan 137 warung kopi, (sumber: dispenda.batamkota.go.id).

2.1.7 Efektivitas Dan Kontribusi

2.1.7.1 Efektivitas

Menurut Mahmudi (2010:143) yang dikutip dalam penelitian Memah (2013), menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Efektivitas suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sasaran atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan. Efektivitas adalah suatu

keadaan yang mengundang pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kata efektif berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan (Adisasmita, 2011: 170).

Besarnya peningkatan efektivitas pajak hotel dan pajak restoran dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rumus efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100 \%$$

Rumus 2.1 Analisis Efektivitas

Pajak daerah dapat dikategorikan tingkat efektivitasnya sebagai berikut:

1. Tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif.
2. Tingkat pencapaian antara 90% - 100% berarti efektif.
3. Tingkat pencapaian antara 80% - 90% berarti cukup efektif.
4. Tingkat pencapaian antara 60% - 80% berarti kurang efektif.
5. Tingkat pencapaian dibawah 60% berarti tidak efektif.

2.1.7.2 Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu *contribute*, *contribution* maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi bisa berupa materi ataupun tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Kontribusi dalam pengertian tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan

oleh individu yang kemudian memberikan dampak positif ataupun negatif terhadap pihak lain. Dengan kontribusi berarti individu itu juga berusaha meningkatkan efektivitas dan efisiensi hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya, sesuatu yang kemudian menjadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya (Anne Ahira: 2012).

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak hotel dan pajak restoran) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil (Mahmudi,2010:145) yang dikutip dalam penelitian Memah (2013).

Semakin besar penerimaan pendapatan daerah yang diterima maka semakin besar pula kontribusi yang diberikannya. Untuk itu penerimaan pendapatan asli daerah khususnya sektor pajak daerah terutama pajak hotel dan restoran setiap tahunnya diharapkan mencapai target atau bahkan melewati target yang ditetapkan. Ini bertujuan agar kontribusi yang diberikan terhadap Pendapatan Asli Daerahnya besar pula.

Kontribusi pajak hotel dan restoran dapat dihitung terhadap PAD dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi pajak hotel/restoran}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Rumus 2.2 Analisis Kontribusi

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan acuan atau tolak ukur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Edward W. Memah (2013), dalam penelitiannya yang berjudul “Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa tingkat efektivitas dari pajak hotel dan restoran pada Tahun 2007-2011 sangat bervariasi. Secara keseluruhan efektivitas dari pajak hotel dan restoran Kota Manado sudah sangat efektif karena secara keseluruhan tingkat efektivitas mencapai persentase lebih dari 100%. Sedangkan, kontribusi pajak hotel dan restoran secara keseluruhan pada Tahun 2007-2011 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD sehingga mempengaruhi jumlah PAD yang diterima.

Randy J.R. Walakandou (2013), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa penerimaan Pajak Hotel Kota Manado

selama Tahun 2007-2011 terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Jumlah penerimaan Pajak Hotel Kota Manado selama Tahun 2007-2011 memberikan Kontribusi yang cukup besar setiap tahunnya, sehingga hal ini mempengaruhi jumlah PAD yang diterima.

Freddy De Rooy dan Novi Budiarto (2015), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Raja Ampat”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah sangat bervariasi. Dari Tahun 2010-2014 realisasi Pajak Daerah terbesar pada Pajak Daerah terjadi pada Tahun 2014 dari semua jenis Pajak Daerah yang ada. Sedangkan, kontribusi paling rendah terjadi pada tahun 2013.

I Gede Oka Dhananjaya dan Ni Made Adi Erawati (2015), dalam penelitiannya yang berjudul “Perbandingan efektivitas dan kontribusi Pajak Daerah pada Pendapatan Asli Daerah”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa rasio efektivitas untuk Kota Denpasar dan Kabupaten Badung dalam penerimaan pajak daerah tergolong dalam kategori sangat efektif. Sedangkan, analisis kontribusi penerimaan pajak daerah pada Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung pada Tahun 2009-2013 selalu berfluktuasi dan rata-rata tingkat kontribusi pajak daerah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung selama lima tahun terakhir dalam kategori baik. Tidak ada perbedaan rasio efektivitas dalam penerimaan pajak daerah antara Kota Denpasar dan Kabupaten Badung pada Tahun 2009-2013, tetapi terdapat perbedaan kontribusi penerimaan pajak daerah pada Pendapatan Asli Daerah antara Kota Denpasar dan Kabupaten Badung tahun 2009-2013.

Siti rochimah dkk (2013) , dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh pajak hotel dan restoran, retribusi daerah dan pajak daerah terhadap PAD Provinsi jawa tengah”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa (1) tidak ada pengaruh yang signifikan antara pajak hotel dan restoran terhadap PAD, (2) ada pengaruh signifikan dan positif antara retribusi daerah terhadap PAD, (3) ada pengaruh yang signifikan antara pajak daerah terhadap PAD.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan diatas berikut adalah tabel penelitian terdahulu:

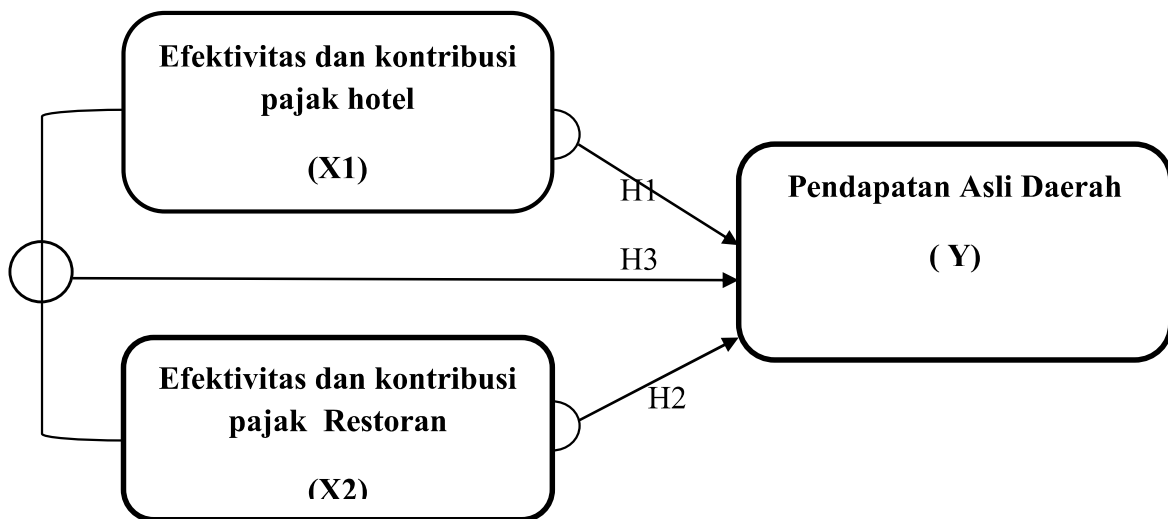
Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti	Hasil Penelitian
1.	Edward W. Memah (2013)	Efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Manado	Efektivitas pajak hotel dan restoran, kontribusi pajak hotel dan restoran, PAD	Efektivitas pajak hotel dan restoran sangat efektif, kontribusinya secara keseluruhan baik terhadap PAD
2.	Randy J.R walakandou (2013)	Analisis Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD di Kota Manado	Kontribusi pajak hotel, PAD	Kontribusi pajak hotel cukup besar terhadap PAD kota manado tahun 2007-2011

3.	Freddy De Rooy dan Novi Budiarto (2015)	Analisis Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Raja Ampat	Kontribusi pajak daerah, PAD	Kontribusi pajak daerah sangat bervariasi dari tahun 2010-2014
4.	I Gede Oka dhananjaya dan Ni Made Adi Erawati (2015)	Perbandingan efektivitas dan kontribusi Pajak Daerah pada PAD Kota Denpasar dan Kabupaten Badung	Efektivitas pajak daerah, kontribusi pajak daerah, PAD	Efektivitas pajak daerah sangat efektif dan kontribusinya dalam kategori baik
5.	Siti Rochimah dkk (2013)	Pengaruh pajak hotel dan restoran, retribusi daerah dan pajak daerah terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah	Pajak hotel dan restoran, retribusi daerah, pajak daerah dan PAD	Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pajak hotel dan restoran terhadap PAD

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis mencoba mengembangkan kerangka pemikirannya. Adapun kerangka pemikiran yang dituangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan secara teoritis diatas, maka penulis membuat hipotesis dalam penelitian ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

H1: Tingkat Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.

H2: Tingkat Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.

H3: Tingkat Efektifitas dan Kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan suatu rencana kerja yang terstruktur dalam hal hubungan-hubungan antara variabel secara komprehensif, sedemikian rupa agar hasil risetnya dapat memberikan jawaban atas pertanyaan riset. Dalam rencana tersebut menutup hal-hal yang akan dilakukan periset mulai dari membuat hipotesis dan implikasinya secara operasional sampai pada akhir (umar, 2010: 5).

Rancangan (desain penelitian) pada hakikatnya mencakup abstraksi isi dan ruang lingkup (*the design is content and scope of the study*). rancangan (desain) penelitian tergantung pula dari pendekatan yang digunakan pada subjek penelitian yang berkaitan dengan eksistensi variabel yang diteliti. eksistensi yang dimaksud apakah variabel yang akan diteliti dimunculkan secara sengaja (dimanipulasi) oleh peneliti dalam suatu eksperimen ataukah variabel yang diteliti adalah variabel yang telah ada secara wajar pada subjek yang diteliti. disamping itu penggambaran konstelasi rancangan penelitian akan dipengaruhi pula oleh jumlah (banyaknya) dan status variabel yang dilibatkan dalam penelitian, sehingga akan terkait dengan identifikasi variabel penelitian dan sudah tentu hipotesis yang dirumuskan (Dantes, 2012: 167).

Menurut Sedarmaanti dan Hidayat (2012: 206) dalam desain penelitian perlu memperhatikan hal berikut diantaranya:

a. Ciri rencana desain penelitian

Desain tergantung derajat akurasi yang diinginkan, tingkat pembuktian tingkat perkembangan bidang ilmu bersangkutan, desain dapat berbentuk alternatif, dan desain yang dipilih biasanya merupakan kompromi yang ditentukan oleh pertimbangan praktis.

b. Desain dalam merencanakan penelitian

Dalam merencanakan penelitian, desain dimulai dengan mengadakan penyeolidikan dan evaluasi terhadap penelitian yang sudah dikerjakan dan diketahui, dalam memecahkan masalah.

c. Desain pelaksanaan penelitian

Desain pelaksanaan penelitian meliputi proses membuat percobaan/pengamatan dan memilih pengukuran variabel, prosedur dan teknik sampling, alat mengumpulkan data, membuat coding, editing, dan memproses data yang dikumpulkan. termasuk proses analisis data dan membuat laporan. desain dalam melaksanakan penelitian terdiri dari:

1. Desain sampel

- a. mendefinisikan sampel
- b. menentukan sampel
- c. menentukan sampel refesentatif

2. Desain instrument/alat

alat adalah alat untuk mengumpulkan data. walau metode penelitian apa saja yang digunakan, masalah desain terhadap alat untuk mengumpulkan data sangat menentukan dalam pengujian hipotesis.

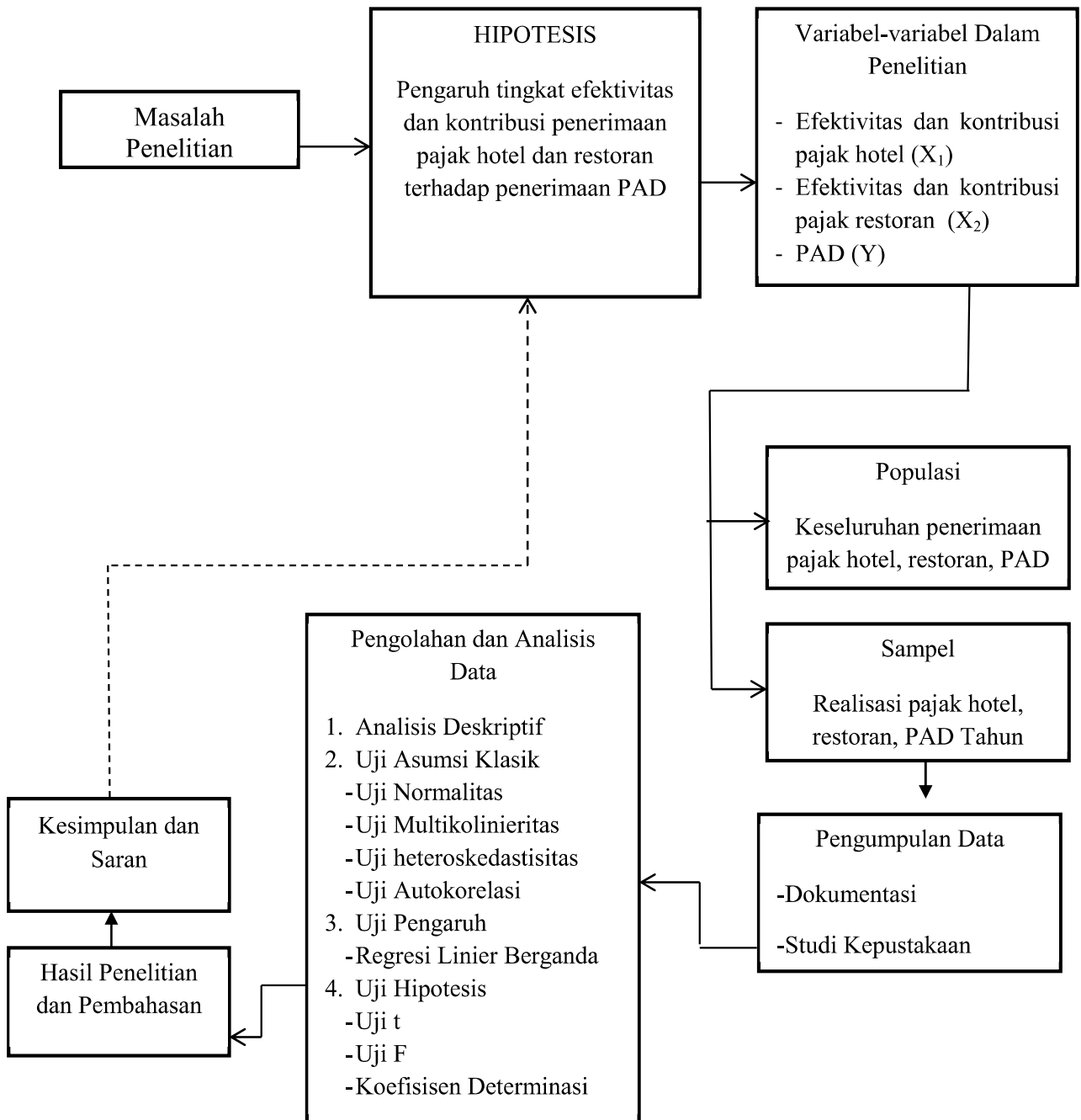
3. Desain analisis

Desain analisis idealnya sudah dikerjakan dahulu sebelum pengumpulan data. jika desain dalam memformulasikan hipotesis cukup baik, maka desain analisis secara paralel dapat dikembangkan dari desain merumuskan hipotesis. hipotesis dianggap baik, jika konsisten dengan analisis yang akan dibuat.

4. Jenis desain penelitian

Pengelompokkan desain percobaan menyeluruh belum dapat dibuat dewasa ini, karena masing-masing ahli mengelompokkan jenis desain penelitian sesuai kondisi ilmuan sendiri.

penelitian pada dasarnya juga mencerminkan standar mutu yang hendak diraih oleh peneliti, dalam arti pembaca dapat dengan mudah menilai kualitas dari suatu penelitian hanya dengan mencermati desain studi suatu penelitian karena penelitian yang baik akan tercermin dari desain penelitiannya. Pada penelitian ini, peneliti menggambarkan sebuah desain adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Desain Penelitian

Berdasarkan gambar diatas secara umum sebuah desain penelitian terdiri atas tiga bagian yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka serta metode penelitian(Martono, 2011: 132). Adapun tahapan-tahapan yang dilalui dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai beberapa tahapan yaitu pertama, menentukan judul penelitian. Kedua, menentukan lalu bidang ilmu (ruang lingkup) pada bagian ini dijelaskan bidang ilmu yang akan melingkupi proses penelitian, bidang ilmu dalam penelitian ini adalah dalam kajian ekonomi dalam hal ini tentang akuntansi yang mengarah ke perpajakan. Ketiga menentukan latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat dari penelitian.

2. Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini, penelitian menjelaskan mengenai konsep utama yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dengan berbagai argumentasi teoritis. Tahapan yang dilalui adalah pertama, mencari teori-teori dasar yang mendukung atau sesuai dengan topik penelitian. Kedua, melihat penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian. Ketiga, membuat sebuah kerangka pemikiran. Lalu selanjutnya adalah

menentukan hipotesis atau dugaan sementara yang berkaitan dengan judul penelitian.

3. Metode Penelitian

Bagian ini dilakukan untuk mengetahui apa yang harus dilakukan selama proses pengumpulan data dilapangan dan setelah data terkumpul. Tahapan yang dilalui adalah. Pertama menentukan variabel yang terdapat dalam penelitian. Kedua, menentukan populasi dan sampel dari penelitian. Ketiga menentukan teknik pengumpulan data, selanjutnya adalah menentukan teknik pengolahan dan analisis data yang terdiri dari beberapa uji yang sesuai dengan penelitian.

3.2 Operasional Variabel

Variabel dapat diartikan sebagai suatu totalitas, gejala atau objek pengamatan yang akan diteliti. oleh kaena itu, dilihat dari fungsinya dapat diklasifikasikan menjadi variabel bebas (prediktor), variabel control, variabel moderator, varriabel penyela, dan variabel tergantung (kriterium). bila variabel ini digambarkan dalam suatu model penelitian, penempatan variabel sangat ditentukan dari paradigma teori yang melandasinya. untuk itulah sangat diperlukan wawasan, pengalaman dan ketelitian serta keterampilan peneliti (Dantes, 2012: 166).

Perumusan Definisi variabel menyangkut perumusan definisi konsep variabel dan perumusan definisi operasional variabel tersebut. perrumusan definisi konsep variabel harus konsisten dengan simpulan teori yang mendasari penelitian yang

bersangkutan, biasanya menyangkut masalah pengertian variabel tersebut secara *definitive*, dimensi dan indikator yang melingkupi variabel tersebut. sementara itu, definisi operasional variabel menyangkut pengakuan variabel tersebut dan penataan peringkat/skala data yang dikumpulkan (nominal, ordinal, interval atau rasio). definisi operasional variabel ini akan sangat menentukan bagaimana suatu instrumen variabel itu direncana dan bagaimana analisis yang akan digunakan (Dantes, 2012: 166).

Variabel penelitian merupakan kegiatan menguji hipotesis, yaitu menguji kecocokan antara teori dan fakta empiris di dunia nyata. hubungan nyata ini lazim dibaca dan dipaparkan dengan berdasarkan kepada variabel. adapun hubungan nyata lazim dibaca dengan memperhatikan data tentang variabel itu. variabel adalah suatu sebutan yang dapat diberi angka (kuantitatif) atau nilai mutu (kualitatif). variabel merupakan pengelompokan secara logis dari dua atau lebih atribut dari objek yang diteliti (Noor, 2011: 47).

3.2.1 Variabel Independen/ Variabel Bebas (X1)

Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. variabel independen ini pula dinamakan variabel yang diduga sebagai sebab (*presumed cause variable*). dari variabel dependen (Sangadji dan Sopiah, 2010: 136).

Variabel bebas atau disebut *dependent variabel* merupakan sebab yang diperkirakan dari beberapa perubahan dalam variabel terikat. biasanya dinotasikan dengan simbol (X). Dengan kata lain, variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat.

dalam perilaku organisasi terdiri dari tiga tingkatan yaitu: variabel tingkat individu, variabel tingkat kelompok, variabel tingkat system informasi (Noor, 2011: 49).

Variabel independen disebut sebagai variabel stimulasi, pediktor, *antecedent*. variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2010: 4).

Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel (X1)

Efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel menunjukkan tingkat kemampuan pemerintah dalam pengumpulan pajak hotel sesuai dengan realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Batam. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan(*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi (mahmudi, 2010: 143).

Adapun indikator yang terdapat dalam variabel independen (X1) dalam penelitian ini yaitu target penerimaan pajak hotel serta realisasi penerimaan pajak hotel dan terhadap PAD Kota Batam Tahun 2011-2015.

2. Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Restoran (X2)

Efektivitas dan Kontribusi penerimaan pajak restoran menunjukkan sejauh mana keefektifan dan kontribusi restoran memberikan sumbangan atau kontribusinya terhadap PAD Kota Batam. semakin besar penerimaannya maka

semakin besar pula kontribusi yang diberikannya terhadap PAD. begitu pula sebaliknya, bila penerimaannya terlalu kecil atau tidak mencapai target maka kontribusinya juga kecil terhadap PAD (Mahmudi, 2010: 145) yang dikutip dalam penelitian Memah (2013).

Adapun indikator yang terdapat dalam variabel independen (X₂) dalam penelitian ini yaitu target penerimaan pajak restoran serta realisasi penerimaan pajak restoran terhadap PAD Kota Batam Tahun 2011-2015.

3.2.2 Variabel Dependen/Variabel Terikat (Y)

Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. variabel ini diduga sebagai akibat dari variabel independen atau disebut variabel konsekuensi (Sangadji dan Sopiah, 2010: 136).

Sedangkan menurut (Sugiyono, 2010: 39) variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.

Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai variabel dependen adalah Pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependen merupakan variabel yang menjadi akibat dari variabel bebas (X). indikator yang terdapat di variabel dependen ini yaitu:

1. penerimaan pajak daerah
2. retribusi daerah

3. laba BUMN
4. pendapatan lainnya yang sah.

3.3 Populasi Dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi dapat didefinisikan sebagai sejumlah kasus yang memenuhi seperangkat kriteria tertentu, yang ditentukan peneliti. Kasus-kasus bias berbentuk peristiwa-peristiwa, manusia, hewan, tumbuhan dan sebagainya. Besarnya populasi mempengaruhi representativitas sampel, karena semakin besar jumlah sampel maka semakin besar peluang sampel mengikuti cirri-ciri dan distribusi populasinya (Dantes, 2013:38).

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari oleh kemudian ditarik kesimpulan. Populasi bias berupa subjek maupun objek penelitian (Sangadji dan Sopiah, 2010: 185).

Sedangkan menurut sugiyono (2010: 61) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan juga benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/

subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek yang diteliti.

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, adapun populasi yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 60. Populasi didapat dari keseluruhan penerimaan PAD, Pajak hotel dan pajak restoran Kota Batam dari tahun 2011-2015 .

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi terlalu besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (Sugiyono, 2010: 62).

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, adapun teknik sampling yang digunakan adalah *nonprobability sampling* yaitu sampling yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Yang mana teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik *sampling jenuh* yaitu teknik pengumpulan sampel bila semua populasi dipilih sebagai sampel, teknik ini disebut juga sensus (Martono, 2011: 79).

Dengan menggunakan *nonprobability sampling* dan *sampling jenuh* maka terkait sampel yang diambil dalam penelitian ini untuk mewakili populasi yang ada maka sampel yang diambil berupa laporan realisasi pajak daerah dalam hal ini khusus

hanya tentang pajak hotel dan pajak restoran, serta realisasi penerimaan PAD Kota Batam tahun 2011-2015. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 60 sampel yang mana didapat dari penerimaan pajak hotel, pajak restoran, serta PAD dari tahun 2011-2015. Yang mana data-data tersebut diambil dari DISPENDA Kota Batam yang telah mendapat izin dari pihak terkait.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian, peneliti harus memahami kriteria data yang baik dan mampu menentukan teknik yang tepat dalam mengumpulkan data. Jika tidak maka data yang dikumpulkan tidak akan diperoleh dengan sempurna (Sangadji dan sopiah, 2010: 190).

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Sekunder

Menurut indrianto dan supomo (2009: 147-148) data sekunder adalah penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data documenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

2. Penelitian Keperpustakaan

Seperti yang kita ketahui perpustakaan adalah tempat penyimpanan berbagai macam buku yang sama ditulis oleh orang yang berbeda memiliki konsep

pemikiran yang berbeda, maka metode ini dilakukan oleh peneliti untuk membaca dan mempelajari beberapa sumber tertulis yang ada seperti buku, jurnal ilmiah yang berhubungan dengan judul penelitian yang oleh peneliti, hal ini dilakukan untuk memperoleh pengetahuan yang berkaitan dengan konsep, aplikasi, dan teori-teori dengan menggunakan bahan ini sebagai sumber rujukan dan pembandingan skripsi dilakukan (Fiskawati: 2015).

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data digunakan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian. Analisis bertujuan untuk memperoleh keterangan tentang besarnya kekuatan variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (sugiyono, 2012: 426).

3.5.1 Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau data populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2010: 29). Statistik deskriptif ini biasanya meliputi kegiatan berupa penyajian data yang berupa grafik dan tabel. Dan melakukan kegiatan peringkasan data dan penjelasan data, berupa letak data, bentuk data dan variasi data (Wibowo, 2012: 24).

Analisis deskriptif menggambarkan tentang ringkasan data-data penelitian seperti mean, standar deviasi, varian, modus dll. Juga dilakukan pengukuran skewness dan kurtosis untuk menggambarkan distribusi data apakah normal atau tidak (Priyatno, 2010: 12).

Analisis deskriptif yang ada dalam penelitian ini bertujuan untuk menyajikan informasi atau karakteristik dari variabel independen yaitu efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran, serta variabel dependennya yaitu PAD.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Syarat uji regresi dan korelasi adalah data harus memenuhi prinsip BLUE (best linear unbiased estimator). Model regresi yang diperoleh dari metode kuadrat terkecil yang umum, atau ordinary least square merupakan suatu model regresi yang dapat memberikan nilai estimasi atau perkiraan linear tidak bias yang paling baik. Maka untuk memperoleh BLUE ada kondisi atau syarat-syarat minimum yang harus ada pada data, syarat-syarat tersebut dikenal dengan uji yang disebut uji asumsi klasik (Wibowo, 2012: 87). Uji tersebut meliputi :

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan guna mengetahui apakah nilai residu yang diteliti memiliki distribusi normal atau tidak normal. Nilai residu yang berdistribusi normal akan membentuk sebuah kurva yang kalau digambarkan akan berbentuk lonceng. Uji ini dilakukan jika data memiliki skala ordinal, interval maupun rasio dan

menggambarkan metode parametrik dalam analisisnya. Jika data tidak berdistribusi normal dan jumlah sampel kecil kemudian jenis data nominal atau ordinal maka metode analisis yang paling sesuai adalah statistik non-parametrik.

Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan histogram regression residual yang sudah distandarkan, analisis chi square dan juga menggunakan nilai kolmogorov-smirnov. Kurva nilai residual terstandarisasi dikatakan normal jika nilai kolmogorov-smirnov $Z < Z_{\text{tabel}}$; atau menggunakan probabiliti sig (2 tailed) $> \alpha$; sig $> 0,05$ (Wibowo, 2012: 62).

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Didalam persamaan regresi tidak boleh terjadi multikolinearitas, maksudnya tidak boleh ada korelasi hubungan yang sempurna atau mendekati sempurna antara variabel bebas yang membentuk persamaan tersebut. Jika pada model persamaan tersebut terjadi gejala multikolinearitas itu berarti sesama variabel bebasnya terjadi korelasi. Gejala multikolinearitas dapat diketahui melalui suatu uji yang dapat mendeteksi dan menguji apakah persamaan yang dibentuk terjadi gejala multikolinearitas. Salah satu caranya dengan menggunakan atau melihat *tool* uji yang disebut *variance inflation factor* (VIF).

Caranya adalah dengan melihat nilai masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Pedoman dalam melihat apakah suatu variabel bebas memiliki korelasi dengan variabel bebas yang lain dapat dilihat berdasarkan nilai VIF tersebut. Jika nilai VIF kurang dari 10, itu artinya menunjukkan model tidak terdapat gejala

multikolinearitas, artinya tidak terdapat hubungan antara variabel bebas. Model lain yang dapat digunakan adalah dengan mengorelasikan antar variabel bebasnya, bila nilai koefisien korelasi antar variabel bebasnya tidak lebih besar dari 0,5 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model persamaan tersebut tidak mengandung multikolinearitas(Wibowo, 2012: 87-88).

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Suatu model dikatakan memiliki problem heteroskedastisitas itu berarti ada atau terdapat varian variabel dalam model yang tidak sama. Gejala ini dapat diartikan bahwa dalam model terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada pengamatan model regresi tersebut. Uji ini diperlukan untuk menguji ada tidaknya gejala ini. Untuk melakukan uji tersebut ada beberapa metode yang dapat digunakan, misalnya dengan metode barlet dan rank spearman atau uji spearmans rho, metode grafik *park gleyser*.

Uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji *park gleyser* dilakukan dengan cara mengorelasikan nilai absolute residualnya dengan masing-masing variabel independen. Jika hasil probabilitasnya memiliki nilai signifikan $>$ nilai alpha-nya(0,05), maka model tidak mengalami heteroskedastisitas.

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Uji auto korelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang terjadi antara residual

pada suatu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Persyaratan yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi pada model regresi. Metode pengujian menggunakan uji durbin-watson (uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika d lebih kecil dari d_l atau lebih besar dari $(4-d_l)$, maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi
2. Jika d terletak antara d_u dan $(4-d_u)$, maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi
3. Jika d terletak antara d_l dan d_u atau diantara $(4-d_u)$ dan $(4-d_l)$, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

Nilai d_u dan d_l dapat diperoleh dari tabel statistik durbin watson yang bergantung pada banyaknya observasi dan banyaknya variabel yang menjelaskan (Priyatno, 2010: 87).

$$d = \frac{\sum_{t=2}^n (e_t - e_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^n e_t^2}$$

Rumus 3.1 autokorelasi

Keterangan:

d = nilai durbin watson

e = residual

Uji autokorelasi digunakan untuk suatu tujuan yaitu mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar anggota serangkaian data yang diobservasi dan dianalisis menurut ruang atau menurut waktu, cross section atau time series. Uji ini bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi antara residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan yang lain pada model. Beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dapat diketahui dengan metode grafik, metode Durbin-Watson, metode runtest, dan uji statistik nonparametrik (Wibowo, 2012: 101).

3.5.3 Uji Pengaruh

3.5.3.1 Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda pada dasarnya merupakan analisis yang memiliki pola teknis dan substansi yang hampir sama dengan analisis regresi linear sederhana. Analisis ini memiliki perbedaan dalam hal jumlah variabel independen yang merupakan variabel penjelas jumlahnya lebih dari satu buah. Variabel penjelas yang lebih dari satu buah inilah yang kemudian akan dianalisis sebagai variabel-variabel yang memiliki hubungan-pengaruh, dengan dan terhadap variabel yang dijelaskan atau variabel dependen (Wibowo, 2012: 126).

Penggunaan model regresi sebagai alat uji akan memberikan hasil yang baik jika dalam model tersebut data memiliki syarat-syarat tertentu atau dianggap memiliki syarat tersebut. Data harus memenuhi suatu uji yang dapat menghasilkan nilai estimasi yang tidak bias.

Regresi linear berganda dinotasikan sebagai berikut:

$$Y' = a + b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + b_nx_n$$

Rumus 3.2 regresi linear berganda

Keterangan:

Y' = PAD

a = Nilai konstan

b = nilai koefisiensi regresi

x_1 = Efektivitas pajak hotel dan pajak restoran

x_2 = Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran

x_n = variabel independen ke – n

3.5.4 Uji Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara tentang rumusan masalah penelitian yang belum dibuktikan kebenarannya. Hipotesis dinyatakan dengan kalimat pernyataan dan bukan kalimat pertanyaan. Dalam hipotesis yang menggunakan sampel, hipotesisnya menggunakan kata signifikan. Signifikan ini mengandung arti bahwa hipotesis yang telah terbukti pada sampel dapat diberlakukan pada populasi (Priyatno, 2010: 9). Dalam hipotesis terdapat dua model hipotesis yaitu sebagai berikut:

1. Hipotesis nihil atau nol hipotesis (H_0) adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antarvariabel.
2. Hipotesis alternatif atau hipotesis kerja (H_a) adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antarvariabel.

Uji hipotesis adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah kesimpulan pada sampel dapat berlaku untuk populasi atau dapat digeneralisasi (Priyatno, 2010: 9).

3.5.4.1 Uji Parsial (T- Test)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel-variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Priyatno, 2010: 68). Pada uji ini tingkat signifikansi menggunakan 0,05 ($\alpha = 5\%$).

Adapun rumusan hipotesis menggunakan uji T dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD Kota Batam.

H_0 : secara parsial tidak ada pengaruh antara tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD Kota Batam.

H_a : secara parsial ada pengaruh antara tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD Kota Batam.

2. Variabel tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap PAD Kota Batam.

Ho: secara parsial tidak ada pengaruh antara tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap PAD Kota Batam.

Ha: secara parsial ada pengaruh antara tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Batam.

3.5.4.2 Uji Simultan (F- Test)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). Jika hubungan signifikan berarti hubungan dapat berlaku pada populasi (Priyatno, 2010: 67). Pada uji ini tingkat signifikansi menggunakan 0,05 ($\alpha = 5\%$).

Untuk kriteria pengujiannya sendiri adalah (H_0) diterima bila F hitung < F tabel dan (H_0) ditolak bila F hitung > F tabel.

Adapun rumusan hipotesis menggunakan Uji F dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Ho:** tidak ada pengaruh antara tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran secara bersama-sama terhadap PAD Kota Batam.
2. **Ha:** ada pengaruh antara tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran secara bersama-sama terhadap PAD Kota Batam.

Adapun F hitung dapat dicari dengan rumus sebagai berikut:

$$F\text{-hitung} = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

Rumus 3.3 F-Test

Keterangan:

R^2 = koefisien determinasi

n = jumlah data atau kasus

k = jumlah variabel independen

3.5.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis ini digunakan dalam hubungannya untuk mengetahui jumlah atau persentase sumbangan pengaruh variabel bebas dalam model regresi yang secara serentak atau bersama-sama memberikan pengaruh terhadap variabel tidak bebas. Jadi koefisien angka yang ditunjukkan memperlihatkan sejauh mana model yang terbentuk dapat menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Koefisien tersebut dapat diartikan sebagai besaran proporsi atau persentase keragaman Y (Variabel terikat) yang diterangkan oleh X (Variabel bebas). Secara singkat koefisien tersebut untuk mengukur besar sumbangan dari variabel X (bebas) terhadap keragaman variabel Y (terikat) (Wibowo, 2012: 135).

Koefisien menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. R^2 sama dengan 0, maka tidak ada sedikitpun persentase sumbangan pengaruh yang

diberikan variabel independen terhadap variabel dependen, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikitpun variasi variabel dependen. Sebaliknya R^2 sama dengan 1, maka persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen (Priyatno, 2010: 66).

3.6. Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.6.1. Lokasi Penelitian

Penelitian dan pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis dokumen dalam bentuk data sekunder berupa Laporan Realisasi APBD Kota Batam tahun 2011 sampai dengan 2015. Objek pada penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Kota Batam yang berlokasi di Gedung Bersama Pemko Lt. 2, Jl. Raja Isa Batam Center. Selain itu penelitian juga dilakukan di Kantor Pemerintah Kota Batam yang berlokasi di Jl. Raja H. Fisabilillah No.1, Tlk. Tering

3.6.2. Jadwal Penelitian

Jadwal pelaksanaan penelitian, pengambilan data serta penyusunan dan pengumpulan hasil penelitian dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1 jadwal penelitian

Nama Kegiatan	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
Studi Kepustakaan	■						
Penentuan Topik		■					
Penentuan Judul			■				
Penentuan Objek			■				
Pengajuan Proposal				■			
Penelitian Lapangan				■			
Pengolahan Data					■		
Pembuatan Laporan Penelitian					■		
Pemeriksaan Laporan Penelitian						■	
Presentase Penelitian							■